



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. PUSPAWATI
Jabatan : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

Dra. Hj. PUSPAWATI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
: 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	1.1.	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%
2.	Menurunnya Angka Kelahiran	2.1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,60
3.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	3.1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	35,15

Program		Anggaran		Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3.064.238.275	PAD
2	Program Pengendalian Penduduk	Rp.	389.353.050	PAD,DAK
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	4.929.143.100	PAD,DAK
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	2.208.829.000	PAD,DAK
TOTAL ANGGARAN 2023		Rp.	10.591.563.425	

BUPATI LUWU TIMUR,



(Drs. H. BUDIMAN, M.Pd)

Malili, 02 Januari 2023
KEPALA DINAS PPKB



(Dra. HJ. PUSPAWATI)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I DEWA PUTU ALIT SWASTIKA,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. Hj. PUSPAWATI
Jabatan : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

Dra. Hj. PUSPAWATI

Malili, 03 Januari 2023

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,

I DEWA PUTU ALIT SWASTIKA,M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
: 2023

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Target
1	2	3	4	5		6	7
1.	Meningkatnya Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	1.	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%
				2.	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
				3.	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100%
				4.	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
				5.	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100%
				6.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%

				7.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%
--	--	--	--	----	--	---	------

No	Uraian (Program/Kegiatan)	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 48.610.000	PAD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.211.718.875	PAD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Rp 16.290.000	PAD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Rp 84.270.000	PAD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 447.270.400	PAD
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 106.199.000	PAD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 149.880.000	PAD
		Rp 3.064.238.275	

KEPALA DINAS,

Dra. Hj. PUSPAWATI

Malili, 2 Januari 2023
SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

I DEWA PUTU ALIT SWASTIKA, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULIATI, SKM MM
Jabatan : KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. Hj. PUSPAWATI
Jabatan : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Dra. Hj. PUSPAWATI

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
KELUARGA BERENCANA

SULIATI, SKM, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Target	Sasaran Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
1	Menurunnya Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	26.76%	1	Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KBPK (Advokasi dan KIE)	100%	1.1	Terlaksananya Advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) kepada stakeholders dan Mitra Kerja	40 Organisasi
	Menurunnya Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	26.76%					1.3	Terlaksanya Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) Melalui media Massa cetak dan Elektronik serta media Luar Ruang	1 Dokumen
										Jumlah media promosi dan KIE yang tersedia (jenis)	2 Jenis

	Meningkatnya Penggunaan Kontrasepsi Modern	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR)	58.9%					1.4	Terlaksana Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan keluarga berencana) melalui rapat Koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan
										Jumlah Peserta rapat koordinasi dan minilokakarya (orang)	1056 Orang
								1.5	Terlaksananya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai yang mendapat dukungan Operasional Pembiayaan (Balai Penyuluhan)	12 Balai
										Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana)	1 Laporan
								1.6	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan hasil program KKBPK yang dikendalikan (Nilai)	1 laporan

2	Meningkatnya Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (persen)	100%	2.1	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokasi (Fasilitas Kesehatan)	21 Faskes
						Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan
				2.2	Terlaksananya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor MKJP (akseptor)	11500 Akseptor
				2.3	Terlaksananya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana yang tersedia (Unit)	76 Unit
				2.4	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibina (Faskes)	21 Faskes

								Jaringan dan Jejaringnya		
									Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan

	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Pembinaan Keluarga Berencana	1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1	Rp 95.045.000	DAK/PAD
			2	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2	Rp 150.000.000	DAK
			3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3	Rp 203.457.000	PAD/DAK
			4	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	4	Rp 636.700.000	PAD/DAK
			5	Pengendalian Program KKBPK	5	Rp 90.910.000	PAD/DAK

	2	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	Rp	55.316.000	DAK, PAD
			2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2	Rp	776.296.100	DAK, PAD
			3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	3	Rp	931.315.000	DAK, PAD
			4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4	Rp	15.900.000	DAK
			TOTAL ANGGARAN			Rp	2.954.939.100	

KEPALA DINAS



(Dra. HJ. PUSPAWATI)

Malili, 2 Januari 2023

KABID KELUARGA BERENCANA



(SULIATI, SKM,MM)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BALOBO ABBAS, SKM, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. Hj. PUSPAWATI
Jabatan : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Dra. Hj. PUSPAWATI

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA

BALOBO ABBAS, SKM, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun Anggaran

: 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Sasaran Kegiatan		Indikator Program	Target	Sasaran Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)		(3)	(4)	(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya Rata-rata usia Kawin Pertama	Rata rata usia kawin pertama	20 Tahun	1	Meningkatnya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	71%	1	Terlaksananya Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, PIK-R,BKL, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah kelompok yang terbentuk	7 Kelompok
								1.2	Terlaksananya pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah unit sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	20 unit
								1.3	Terlaksananya orientasi/pelatihan kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS	Jumlah kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut Orientasi/pelatihan	76 klp
								1.4	Terlaksananya penyediaan operasional bagi pengelola dan	Jumlah Kader Pengelola dan pelaksana (Kader)	687 Orang

									pelaksana ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPK S)	
								1.5	Terlaksana promosi dan sosialisasi kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS	Jumlah kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi	65 Klp
								1.6	Terlaksana advokasi dan promosi Indeks pembangunan keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan advokasi dan promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	90 orang
				2	Meningkatnya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	76,02	2.1	Terlaksana promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Jumlah peserta promosi dan sosialisasi	60 orang

	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
--	---------	----------	--------------	----------	------------

1.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.	Pembentukan kelompok ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS)	1.	Rp	19.603.000	PAD
				2.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	2.	Rp	360.000.000	DAK/PAD
				3.	Orientasi/Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.	Rp	168.142.000	PAD
				4.	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	4.	Rp	1.442.700.000	DAK
				5	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.	Rp	184.540.000	PAD

			6	Advokasi dan Promosi IPK	7.	Rp	17.144.000	PAD	
		2.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.	Promosi dan Sosilisasi program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga bagi mitra Kerja	1.	Rp	16.600.000	PAD
TOTAL ANGGARAN							Rp	2.208.729.000	

KEPALA DINAS



(Dra. HJ. PUSPAWATI)

Malili, 2 Januari 2023

KABID KETAHANAN DAN KELUARGA SEJAHTERA



(BALOBO ABBAS, SKM,MM)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I NENGAH SUDIASA, SKM
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. Hj. PUSPAWATI
Jabatan : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Dra. Hj. PUSPAWATI

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK,
PENYULUHAN DAN
PENGGERAKAN

I NENGAH SUDIASA, SKM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menurunnya Rata-rata anak per keluarga	Rata-rata anak per keluarga	2,02	1. Meningkatnya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)	2 Dokumen	1.1 Terlaksananya Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 laporan
							1.2 Terlaksananya Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang mengikuti Sosialisasi tentang pemanfaatn kajian dampak kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai peringatan dini dampak kependuduk kepada pemangku kepentingan(organisasi)	24 Organisasi

							1.3 Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan
				2. Meningkatnya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa	100%	2.1 Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	1 Dokumen
							2.2 Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB	1 Dokumen
				3. Meningkatnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) yang telah didayagunakan	100%	3.1 Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan
							3.2 Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	581 Orang

				4. Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	24	4.1 Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di Kampung KB	24 Kampung KB
	Meningkatnya Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	39.14%	5. Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Advokasi Komunikasi yang informasi dan edukasi Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 kegiatan	4.2 Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	3 Dokumen

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran		Keterangan
1.	Program Pengendalian Penduduk	1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1.1	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Rp	22.890.600	PAD
				1.2	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Rp	26.700.000	PAD
				1.3	Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Rp	25.350.000	PAD
		2.	Meningkatnya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Rp	178.212.450	DAK/PAD
				2.2	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rp	136.200.000	DAK/PAD

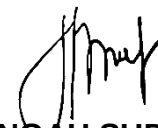
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3.1	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Rp 126.102.000	PAD
				3.2	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp 1.367.587.000	DAK/PAD
		4.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	4.1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Rp 442.940.000	DAK/PAD
		5.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	5.1	Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	Rp 37.575.000	PAD
						Rp 2.363.557.050	

KEPALA DINAS,



Dra. Hj. PUSPAWATI

Malili, 2 Januari 2023
KABID PENGENDALIAN PENDUDUK,
PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN,



(I NENGAH SUDIASA, SKM)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSDIAWATI,S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I DEWA PUTU ALIT SWASTIKA,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

I DEWA PUTU ALIT SWASTIKA, M.Si

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN

MUSDIAWATI,S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah
 Tahun Anggaran

: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 : 2023

Sasaran Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan		Target
1		2		3
1.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3 Dokumen
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.1	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 Dokumen
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.1	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 Dokumen
4.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.1	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	8 Dokumen
5.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.1	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	8 Dokumen
6.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.1	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	2 Orang

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 17.000.000	PAD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 3.000.000	PAD
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3.000.000	PAD
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 25.610.000	PAD

5.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	25.000.000	PAD
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	59.270.000	PAD

SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,



I DEWA PUTU ALIT SWASTIKA,M.Si

Malili, 2 Januari 2023
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN,



MUSDIAWATI,S.Sos



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURYANI NASIR, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I DEWA PUTU ALIT SWASTIKA, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

I DEWA PUTU ALIT SWASTIKA, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN

NURYANI NASIR, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun Anggaran

: 2023

Sasaran Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan		Target
1		2		3
1	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.1	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	18 Orang
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.1	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	10 Dokumen
3	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.1	Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen
4	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.1	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	2 Jenis
5	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	217 Jenis
6	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.1	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (paket)	1 Paket
7	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.1	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)	60 Eksamplar
8	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	8.1	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	260 Orang
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.1	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	389 Kali
10	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.1	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	600 Surat
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.1	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	48 Rekening
12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.1	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	3 Orang

13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.1	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (Unit)	113 Unit
14	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.1	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	3 Unit
15	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.1	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (Unit)	2 Unit

Sub Kegiatan		Anggaran		Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	2.182.358.875	PAD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	29.360.000	PAD
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	16.290.000	PAD
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	3.250.000	PAD
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	5.800.000	PAD
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	7.500.000	PAD
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	6.120.000	PAD
8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	9.100.000	PAD
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	415.500.400	PAD

10.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	14.999.000	PAD
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	50.400.000	PAD
12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	40.800.000	PAD
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	88.000.000	PAD
14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	6.880.000	PAD
15.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	55.000.000	PAD

SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,



I DEWA PUTU ALIT SWASTIKA,M.Si

Malili, 2 Januari 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEUANGAN,



NURYANI NASIR, SE